

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DALAM TRANSISI PERUBAHAN BASIS AKUNTANSI DAN PERBEDAAN KUALITAS OPINI BPK

Study Empiris Di Kab. Kebumen, Periode 2013-2018

Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen

Email: ahkmadsyarifudin89@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten kebumen pada tahun 2013-2018. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah atau instruktif. Pengelolaan keuangan daerah dalam tergolong sangat efektif dan efisien. Penggunaan dana belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Tingkat Pertumbuhan pendapatan, PAD, belanja operasi, dan belanja modal rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif namun masih fluktuatif. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah masih tergolong kurang.

Paska perubahan basis akuntansi pemerintahan sejak tahun 2015 terdapat peningkatan yang signifikan pada realisasi PAD. Perkembangan rasio belanja operasional setelah penerapan akuntansi berbasis *accrual* secara umum menurun dengan rata-rata lebih rendah 63,93% jika dibandingkan pada saat menggunakan basis akuntansi *cash toward actual* dengan rata-rata lebih tinggi yaitu 67,04%. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kemandirian sebelum perubahan basis akuntansi rata-rata 15,39% dan meningkat menjadi 20,28% setelah perubahan basis akuntansi pemerintahan dan rasio derajat desentralisasi sebelum perubahan basis akuntansi rata-rata sebesar 14,23% dan meningkat menjadi 12,79% setelah perubahan basis akuntansi pemerintahan.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (direvisi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah. Sesuai amanat UU tersebut, Pemerintah Daerah mendapat pelimpahan wewenang yang luas dalam pengambilan keputusan penting, tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di era otonomi, pemerintah dan DPR telah membuat regulasi dibidang keuangan negara dengan menerbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan UU tersebut manajemen sektor publik mengalami perubahan yang fundamental. Sistem pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Reformasi bidang Pengelolaan keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang yang memasukkan kerangka ilmu

manajemen kinerjadan ilmu akuntansi. Paket UU tersebut meliputi; UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Penetapan ketiga UU tersebut telah merubah sistem anggaran tradisional menjadi berbasis kinerja, dan sistem akuntabilitas yang *vertikal* menjadi *horizontal*. Paket UU ini kemudian menjadi dasar bagi Institusi Negara dalam mengubah sistem administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*). Sistem anggaran tradisional berubah menjadi berbasis kinerja, dan sistem akuntabilitas yang *vertikal* menjadi *horizontal*.

Menurut hasil penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan Hamzah (2009) di Jawa Timur, menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengurangan dan kemiskinan. Kemudian menurut hasil penelitian Joko Pramono (2011) di Pemkot Surakarta menunjukkan aspek kemandirian dan aspek keserasian masih kurang, sedangkan rasio belanja

terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011). Kemudian Hasil penelitian Anim Rahmayati (2016) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kebumen, menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio

aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Pertama melakukan analisis selama lima tahun (2013-2017). Hasil analisis tersebut kemudian untuk membandingkan antara terjadinya perubahan basis akuntansi dan membandingkan diantara perbedaan kualitas opini.

Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kebumen periode 2013-2017?
2. Bagaimana perubahan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kebumen dalam perbedaan kualitas opini periode 2013-2017?
3. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kebumen sebelum dan setelah perubahan basis akuntansi pemerintahan?

KAJIAN PUSTAKA

Teori New Public Management (NPM)

Teori New Public Management (NPM) disebut juga dengan nama lain misalnya *Post-bureaucratic Paradigm* (Barzelay, 1992), dan *Reinventing Government* (Osborne dan Gaebler, 1992). Paradigma alternatif dalam ilmu

administrasi publik ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip *The Invisible Hand*-nya Adam Smith, yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih fokus pada kepentingan publik yang lebih luas. Model dalam teori NPM lebih mengutamakan kinerja daripada kebijakan. Paradigma baru tersebut menimbulkan tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender.

Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintahan pusat maupun daerah harus menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan APBN/APBD yang disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Fungsi utama laporan keuangan pemerintah adalah untuk

memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. (Mahmudi, 2007).

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Paket peraturan perundang-undangan keuangan negara telah dilakukan perubahan secara fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*), anggaran kinerja (*performance budget*), dan setiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*). Untuk itu pemerintah telah menetapkan sistem akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai ganti PP No. 24 Tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

Pengertian APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dengan tujuan agar dapat menjadi pedoman pendapatan dan pengeluaran keuangan dalam proses penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka otonomi daerah dan meningkatkan kemakmuran. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah semakin efisien dan efektif dalam pembangunan, selain itu juga dapat menghindari pemborosan, kesalahan, maupun penyelewengan yang merugikan negara.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan. Mardiyasmo (2002) mengungkapkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dilakuka dalam membandingkan kinerja keuangan dalam perubahan basis akuntansi. Seperti hasil dari penelitian yang dilakukan Kurrohman (2013) menunjukan hasil bahwa terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintahdaerah di kabupaten/kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam pengukuran efisiensi dan ekonomis, sedangkan untuk efektivitas tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah

penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Setiaji & Adi (2007) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total belanja sebelum dan sesudah otonomi daerah, sedangkan terdapat perbedaan dalam angka pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah. Azhar (2010) menemukan bahwa terdapat perbedaan kinerja dalam bentuk desentralisasi fiskal, upaya fiskal dan kemampuan pembiayaan dalam masa sebelum dan sesudah penerapan kebijakan otonomi daerah. Sedangkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan pada pemerintah daerah dalam bentuk efisiensi penggunaan anggaran pada masa sebelum dan setelah penerapan kebijakan otonomi daerah.

Ronald & Sarmiyatiningsih (2010) menemukan bahwa kinerja keuangan daerah pada pemerintah di Kabupaten Kulo Progo yang diukur dengan tingkat kemandirian keuangan daerah selama masa sebelum dan setelah penerapan otonomi daerah mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini

akan menguji analisis kinerja keuangan di kabupaten Kebumen sebelum dan sesudah penerapan basis akrual.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen periode tahun 2012-2018.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel berupa rasio-rasio keuangan yang relevan yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektivitas
3. Rasio keserasian
4. Rasio Belanja rutin terhadap APBD

5. Rasio Belanja Modal terhadap APBD

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Analisis Data dan Pembahasan

Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada penelitian ini adalah : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Desentralisasi Fiskal. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diperoleh dari situs resmi Kementrian Keuangan Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100 \dots (1)$$

Tabel IV.1
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2013	131,481,736,502	1,135,499,305,803	11.58%	Instruktif
2014	242,079,502,075	1,233,776,681,950	19.62%	Instruktif
2015	245,159,255,421	1,343,315,952,370	18.25%	Instruktif
2016	291,016,321,703	1,779,771,732,786	16.35%	Instruktif
2017	443,608,862,461	1,712,419,381,173	25.91%	Instruktif
2018	347,309,619,000	1,683,354,032,000	20.63%	Instruktif

Sumber: djpk.kemenkeu (diolah)

Menurut uraian di atas bahwa Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksteren masih sangat tinggi, dimana daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk

membiyai pembangunan daerahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD.

Dari tabel IV.1 dapat diketahui bahwa derajat kemandirian sebelum perubahan basis akuntansi yaitu pada tahun 2013 dan 2014 yang masih menggunakan cash toward accrual memiliki nilai rasio mencapai 19.62%. Sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 telah mengalami perubahan basis akuntansi menjadi basis accrual, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan di bandingkan dengan 2014 yang belum mengalami perubahan basis akuntansi yaitu sebesar 18.25% pada tahun 2015 dan 16.35% pada tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 19.62%. tetapi pada 2017 dan 2018 mengalami peningkatan dari pada 2014 dimana belum mengalami perubahan basis akuntansi, yaitu sebesar 25.91% pada tahun 2017 dan 20.63% pada tahun 2018.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \dots (2)$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rell daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Efektivitas PAD dapat di lihat dibawah ini:

Tabel IV.2
Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REP AD (%)	Kriteria
2013	116,720,489,000	131,481,736,502	112.65	Sangat Efektif
2014	163,586,346,000	242,079,502,075	147.98	Sangat Efektif
2015	221,657,039,000	245,159,255,421	110.60	Sangat Efektif
2016	273,228,579,000	291,016,321,703	106.51	Sangat Efektif
2017	437,343,224,000	443,608,862,461	101.43	Sangat Efektif
2018	364,092,341,000	347,309,619,000	95.39	Cukup Efektif

Sumber: djpk.kemenkeu (diolah)

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas PAD Keuangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 sebesar 112.65% dengan kriteria sangat efektif, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan. Tahun 2014 efektivitas mengalami kenaikan menjadi 147.98% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan.

Dari tabel IV.2 dapat diketahui bahwa perkembangan rasio efektivitas sebelum perubahan penerapan basis akuntansi yaitu pada tahun 2013 dan 2014 dimana masih menggunakan basis cash toward accrual secara umum dapat dikatakan lebih efektivitas dari pada pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang telah mengalami perubahan basis akuntansi menjadi basis accrual. Bahkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 95.39% urang dari 100% sehingga dikatakan cukup efektif.

Rasio Efisiensi keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots (3)$$

Rasio Efisiensi keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tabel IV.3
Penghitungan Rasio Efisiensi
Keuangan Daerah Pemerintahan
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REK D (%)	Kriteria
2013	1,548,176,706,140	1,626,530,654,021	95.18 %	Efisien
2014	1,906,501,957,288	1,967,047,779,137	96.92 %	Efisien
2015	2,285,364,998,990	2,326,188,256,641	98.25 %	Efisien
2016	2,707,059,847,131	2,606,209,824,034	103.87 %	Tidak Efisien
2017	2,630,271,307,685	2,713,113,397,677	96.95 %	Efisien
2018	2,812,902,414,000	2,647,019,919,000	106.27 %	Tidak Efisien

Sumber: Djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 efisiensinya tergolong Efisien yaitu sebesar 95,18%, 96,92%, 98,25%, dan 96,95%. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2018

tergolong tidak efisien dengan nilai sebesar 103,87% dan 106,27%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tergolong Efisien karena rata-rata rasionya 99,57%, meskipun ditahun 2016 dan 2018 total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya. Meskipun rata-rata Efisiensi nya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Dari tabel IV.3. dapat dilihat perkembangan rasio efisensi sebelum masa perubahan basis akuntansi yaitu pada tahun 2013 dan 2014 dikatakan lebih efisien yaitu berada pada rasio 95.18% pada tahun 2013 dan 96.92% pada tahun 2014. Sedangkan setelah mengalami perubahan basis akuntansi

menjadi basis acrual menjadi kurang efisien dilihat pada tahun 2016 sebesar 103.87% dan 2018 sebesar 106.27% yang melebihi angka 100% sehingga dikatakan tidak efisien.

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Oprasi} = \frac{\text{Total Belanja Oprasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots(4)$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots(5)$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4
Penghitungan Rasio Keserasian
Pemerintah Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun Anggaran 2013-2018(Belanja Operasi)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Oprasional (Rp)	Rasio Belanja Oprasional (%)
2013	1,548,176,706,140	1,115,142,005,329	72.03
2014	1,906,501,957,288	1,179,099,679,995	61.85
2015	2,285,364,998,990	1,477,390,569,899	64.65
2016	2,707,059,847,131	1,713,325,387,671	63.29
2017	2,630,271,307,685	1,743,928,710,811	66.30
2018	2,812,902,414,000	1,728,997,326,000	61.47

Sumber: Djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Tabel IV.5
Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013-2018 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2013	1,548,176,706,140	433,034,700,811	27.97
2014	1,906,501,957,288	727,402,277,293	38.15
2015	2,285,364,998,990	807,974,429,091	35.35
2016	2,707,059,847,131	993,734,459,460	36.71
2017	2,630,271,307,685	886,342,596,874	33.70
2018	2,812,902,414,000	1,083,905,088,000	38.53

Sumber:Djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. dimulai pada tahun 2013 rasio belanja operasinya sebesar 72.03%

mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 61,88%, kemudian naik pada tahun 2015 sebesar 64,65%, dan pada tahun 2016 turun lagi menjadi 63,29%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 66,30% dan pada tahun 2018 turun menjadi 61,47%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 64,93%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal tahun 2013 sebesar 27.97% naik menjadi 38.15% pada tahun 2014, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 35.35%,naik pada tahun 2016 menjadi 36.71%, pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 33.70% dan di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 38.53%sehingga rata-rata rasionya sebesar 35,07%.

Dari tabel IV.4 dapat dilihat perkembangan rasio keserasian belanja operasional sebelum perubahan basis akuntansi yaitu pada tahun 2013 dan 2014 lebih tinggi yaitu memiliki rasio rata-rata sebesar 67.04% dibandingkan pada tahun 2015,2017,2017 dan 2018 yang telah menerapkan basis acrual yaitu sebesar 63.93%.

Dari tabel IV.5 dapat dilihat setelah penerapan akuntansi berbasis acrual secara umum pada tahun 2015,2016,2017 dan 2018 mengalami

penurunan yaitu memiliki rata-rata sebesar 27.23% jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 yang masih menggunakan basis cash toward accrual dengan rata-rata sebesar 33.06%.

Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{pn-po}{po} \dots\dots(7)$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Oprasional yang digunakan pada tahun ke-n

Po = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Oprasional yang digunakan pada tahun ke-0 (tahun sebelumnya n)

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintahan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Tabel IV.6
Penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018
Sumber: Djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Tabel IV.7

Tahun	PAD (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2013	131,481,736,502	1,626,530,654,021	-	-
2014	242,079,502,075	1,967,047,779,137	84.12	20.94
2015	245,159,255,421	2,326,188,256,641	1.27	18.26
2016	291,016,321,703	2,606,209,824,034	18.71	12.04
2017	443,608,862,461	2,713,113,397,677	52.43	4.10
2018	347,309,619,000	2,647,019,919,000	-21.71	-2.44
Rata-rata			26.96	10.58

. Penghitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Oprasional dan Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018

Tahun	Belanja Oprasional(Rp)	Belanja Modal(Rp)	Rasio Belanja Oprasional (%)	Rasio Belanja Modal (%)
2013	1,115,142,005,329	433,034,700,811	-	-
2014	1,179,099,679,995	727,402,277,293	5.74	67.98
2015	1,477,390,569,899	807,974,429,091	25.30	11.08
2016	1,713,325,387,671	993,734,459,460	15.97	22.99
2017	1,743,928,710,811	886,342,596,874	1.79	-10.81
2018	1,728,997,326,000	1,083,905,088,000	-0.86	22.29
Rata-rata			9.59%	22.71%

Sumber: Djpk.Kemenkeu(Diolah)

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan pendapatan daerah, perkembangan dari tahun ke tahun pertumbuhan pendapatan daerah masih kurang baik dikarenakan mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2014 tumbuh 20.94%. Tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar

18.26% dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 sebesar 12.04%, tahun 2017 sebesar 4.10% dan tahun 2018 sebesar -2.44%. Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10.58%

Dari tabel IV.7. secara umum belanja operasonal dan belanja modal mengalami peningkatan terutama setelah penerapan basis acrual. Penurunan belanja operasional paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai minus yaitu sebesar -0.86%. dan penurunan belanja modal paling tinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai angka minus yaitu sebesar -10.81% dalam artian jumlah belanja modal mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya meskipun nominalnya masih lebih tinggi dibandingkan sebelum perubahan basis akuntansi pemerintahan.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\% \dots (8)$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terdapat Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Penghitungan Rasio Derajat Fiskal Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018
Sumber:djpk.kemenkeu.(diolah)

Menurut uraian dari perhitungan

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keu.
2013	131,481,736,502	1,626,530,654,021	8.08	Sangat Kurang
2014	242,079,502,075	1,967,047,779,137	12.31	Kurang
2015	245,159,255,421	2,326,188,256,641	10.54	Kurang
2016	291,016,321,703	2,606,209,824,034	11.17	Kurang
2017	443,608,862,461	2,713,113,397,677	16.35	Kurang
2018	347,309,619,000	2,647,019,919,000	13.12	Kurang

dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dari 2013 sampai 2018 pada Pemerintah Kabupaten kebumen masih kurang karena masih berada dalam skala interval 10,01% - 20,00%. Pada tahun 2013 sebesar 8.08%, pada tahun 2014 naik sebesar 12.31%, tahun 2015 turun sebesar 10.54%, tahun 2016 naik sebesar 11.17%, tahun 2017 naik menjadi 16.35, tahun 2018 mengalami penurunan

sebesar 13.12% dan dengan nilai rata-rata 11.93%. Hal ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Sangat Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Kebumen masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen.

Dari tabel IV.8. dapat dilihat bahwa rasio derajat desentralisasi sebelum perubahan basis akuntansi yaitu pada tahun 2013 dan 2014 memiliki rata-rata sebesar 10.19% dan mengalami peningkatan setelah mengalami perubahan basis akuntansi menjadi basis acrual pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yaitu sebesar 12.79%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen masih tergolong sangat rendah dan dalam

kategori pola hubungan instruktif dengan nilai rasionya sebesar 18,72%. Setelah mengalami perubahan basis akuntansi dan menjadi basis acrual rasio kemandirian mengalami penurunan dari pada sebelum perubahan basis acrual.

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, dengan rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu sebesar 112,43%. Perkembangan rasio efektivitas sebelum perubahan basis akuntansi dikatakan secara umum lebih efektif karena setelah menerapkan basis acrual nilai rasio menurun kurang dari 100%
3. Tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kebumen sudah Efisien, dengan rata-rata rasionya sebesar 99,57%.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kerasian masih lebih besar mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. Rasio Belanja Operasinya rata-rata rasionya

sebesar 64,93% sedangkan Rasio Belanja Modal rata-rata rasionya sebesar 35,07%.

5. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten kebumen tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 26,96% lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatannya yang hanya sebesar 10,58%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal mengalami pertumbuhan secara positif, rata-rata pertumbuhannya sebesar 22,71% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi yang sebesar 9,59%.
6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ditahun 2013 dikategorikan sangat kurang karena rasionya 8,08% dan tahun-tahun selanjutnya yaitu 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 masih tergolong kurang. Rata-rata rasionya sebesar 11,93% atau masih berada dalam skala interval 10,01-20,00 Artinya kontribusi PAD dalam menyelenggarakan desentralisasi masih sangat kurang. Dalam rasio derajat desentralisasi setelah mengalami perubahan basis ekonomi menjadi basis accrual menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi dari pada sebelum basis accrual yaitu sebesar 12,79%.
7. Dalam masa transisi perubahan basis akuntansi pemerintahan sejak tahun 2015 dari cash basis toward actual menjadi accrual terdapat perubahan peningkatan yang cukup signifikan pada besaran anggaran pendapatan asli daerah dan realisasinya.
8. Perkembangan rasio belanja operasional pasca penerapan akuntansi berbasis accrual secara umum menurun dengan rata-rata lebih rendah 63,93% jika dibandingkan pada saat menggunakan basis akuntansi cash toward actual dengan rata-rata lebih tinggi yaitu 67,04%
9. Dari tabel dapat diketahui bahwa rasio kemandirian sebelum perubahan basis akuntansi rata-rata 15,6% dan meningkat menjadi 20,28% setelah perubahan basis akuntansi pemerintahan.
10. Rasio derajat desentralisasi sebelum perubahan basis akuntansi rata-rata sebesar 10,19% dan meningkat menjadi 12,79% setelah

perubahan basis akuntansi pemerintahan.

SARAN

1. Pemerintah kabupaten Kebumen perlu megoptimalkan sumber sumber PAD baik pajak, retribusi maupun sumber pendapatan lainnya yang sah agar dapat mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian daerah.
2. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terutama saat penyusunan anggaran agar dapat menghindari pemborosan maupun pengeluaran belanja yang kurang bernilai tambah.
3. Pemerintah perlu menyusun anggaran belanja modal yang lebih konservatif guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menelaah potensi daerah lebih jauh, mendorong aparatur, swasta dan masyarakat kemudian mengkaji model manajemen aset daerah guna peningkatan kemandirian dari pelayanan publik serta bisa menghasilkan informasi sebagai

pertimbangan dalam mengambil keputusan.

5. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih rinci dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio yang lebih banyak, memperluas lingkup penelitian atau dengan membuat komparasi dengan daerah lain disertai penggunaan metode penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. K. S. (2010). Analisis Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Study Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, 2(1), 46-56.
- Bastian Indra dan Gatot S, 2003, *Sistem Akuntansi Sektor Publik- Konsep untuk Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Suatu Pengantar, Erlangga.
- Dwijayanti, Retno.,Rusherlistyanti,., *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Seindonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 12. Nomor 01. Maret 2013.
- Halim Abdul , 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik:*

- Akuntansi Keuangan Daerah*. SalembaEmpat. Jakarta.
- Harahap Sofyan Sahri, 2006. *Analitis Kritis atas Laporan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kurniati, Siti., Achmad, Tarmizi, Drs. H. MBA, Ph.D, Akt. (2009) Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-JawaTengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008.
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1-11.
- Rahmayati, Anim. (2016) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1 Maret 2016*.
- Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. *EFEKTIF –Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 1(1), 31-42.
- Setiaji, W., & Adi, P.H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-2

